

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arto, Mukti 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Asnawi, M. Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Pengadilan, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, Malang.
- Kamil, Ahmad, H.M. Fauzan, 2008, *Kearah Pembaruan Hukum Acara Perdata dalam SEMA dan PERMA*, Kencana, Jakarta.
- Makarao, Taufik 2004, *Pokok- pokok Hukum Acara Perdata*, cetakan I, Rineka Raya, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sasangka, Hari, Ahmad Rifai, 2005, *Perbandingan HIR dengan RBg disertai dengan Yurisprudensi MA RI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, Bandung.
- Satrio, J. 1996, *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan*, cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, R. 1977, *Hukum Acara Perdata*, Bima Cipta, Bandung.
- Subekti, R, R. Tjitrosudibio, 2005, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata (Burgerlitjk Wetboek)*, cet. 35, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Sugeng, Bambang, Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Hasil Penelitian

Hutajulu, Marthina Ulina Sangian, 2016, *Tinjauan Yuridis Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) terhadap barang yang sudah dilakukan penjualan lelang*, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Boediono, Arief, 2011, *Pelaksanaan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar bij Voorraad) dan Hambatannya dalam Perspektif Perwujudan Kepastian Hukum di Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Sleman*, Tesis Program Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Subyakto, Kuku, 2005, *Akibat Hukum terhadap Pelaksanaan Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu*, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

C. Makalah

Halim Massalli, H.A., “*Kewenangan Pengadilan dalam Eksekusi Uitvoerbaar bij Voorraad*”, Makalah, disampaikan pada Seminar Sehari Fakultas Hukum Universitas Muria, Kudus, 22 Juni 2002

D. Jurnal

Abikusno, M. Rahyono, “*Putusan Provisionil dan Penerapannya dalam Praktik di Pengadilan Negeri*” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juli 1983.

E. Peraturan Perundang-undangan

Herzien Indonesis Reglement (HIR) (Staatblad 1941 No. 44) Berlaku untuk Jawa dan Madura)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23
(*Burgerlijk Wetboek*)

Reglement Buitengewesten (RBg) (Staatsblad 1927 No. 227 berlaku untuk darah luar Jawa dan Madura)

Reglement op de Rechtsvordering (RV), merupakan hukum acara pidana dan perdata bagi golongan eropa dan timur asing.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor No. 06 Tahun 1975 tentang *Uitvoerbaar bij Voorraad*

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan provisionil.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor No. 4 Tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan provisionil.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. (Nomor Surat 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

F. Internet

Ilman Hadi, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan-It50b2e5da8aa7c/putusan-yang-inkracht/diakses-pada-tanggal-18-Februari-2020-pukul-14.00-WIB>

H. Suwardi, [pt-bandung.go.id/uploads/8_paparan%20tuada%20perdata\(1\).pdf](http://pt-bandung.go.id/uploads/8_paparan%20tuada%20perdata(1).pdf), diakses pada tanggal 10 Maret 2020, pukul 20.55 WIB

Fahira Nabila, <https://smartlegal.id/hukum-keluarga/2019/01/08/cara-membagi-harta-gono-gini-setelah-perceraian/>, diakses pada tanggal 26 April 2020 pukul 22.00 WIB

Hariandi Law Office, <http://www.gresnews.com/berita/tips/75264-peringatan-untuk-pelaksanaan-putusan-pengadilan/>, diakses 29 April 2020 pukul 15.00 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jaminan> pada 2 Mei 2020, pukul 20.00 WIB.